



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PARIWISATA
KOMISI X DPR RI KE KABUPATEN KLUNGKUNG BALI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 27 S.D. 29 SEPTEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

Terhadap rencana penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Komisi X DPR RI berpandangan bahwa revisi tersebut harus memberi penekanan terhadap peningkatan kesadaran pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat tentang pentingnya penerapan konsep pariwisata yang terintegrasi dengan budaya. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata ke Kabupaten Klungkung Bali guna menyerap informasi dan masukan pemerintah daerah dan pemangku pariwisata mengenai konsep dan implementasi integrasi budaya dan pariwisata.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
9. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
12. Keputusan Rapat Intern Komisi X tanggal 22 Agustus 2023 tentang keputusan melakukan kunjungan kerja spesifik RUU Kepariwisata ke Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

B. Tujuan

Tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk melakukan komunikasi intens, mendapatkan data faktual, menggali dan menyerap aspirasi dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan bidang pariwisata di Kabupaten Klungkung, untuk beberapa hal terkait implementasi Undang-Undang tentang Kepariwisata, mendapat informasi/data mengenai ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan revisi

Undang-Undang tentang Kepariwisata, mendapatkan masukan terkait pengelolaan pariwisata khususnya dalam hal integrasi budaya dan pariwisata, serta mengetahui praktik penyelenggaraan kepariwisataan pariwisata budaya.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Klungkung Bali terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, didampingi oleh Fahmy Akmal, SSTP., M.Si., Direktur Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, dan Nova Arisne, S. Kom., M.T, M.Sc., Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf RI. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan DPR RI.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Klungkung Bali adalah:

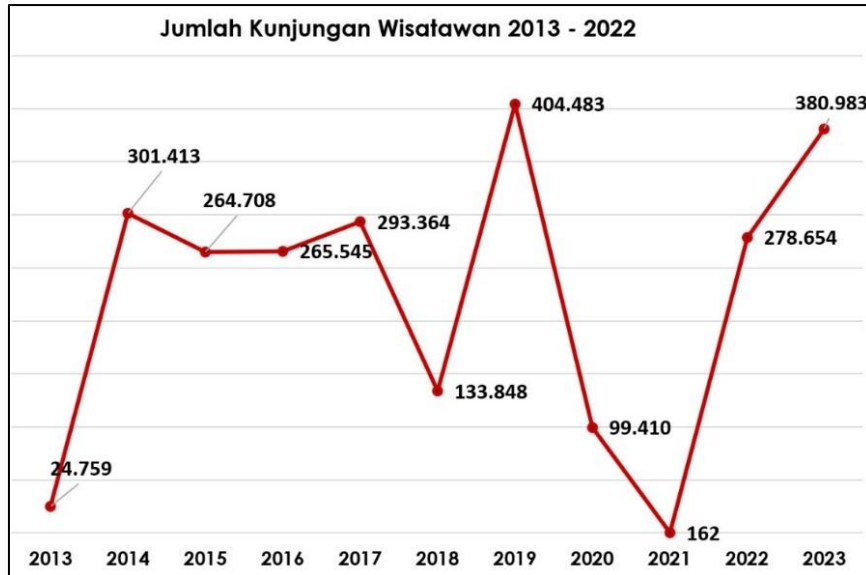
1. Pertemuan dengan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang dihadiri oleh:
 - a. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Tjokorda Gde Agung.
 - b. Sekda Kabupaten Klungkung Agung Gede Lesmana.
 - c. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati.
 - d. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung.
 - e. Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung.
 - f. Desa Wisata di Klungkung: Desa Wisata Tihingan, Desa Wisata Bakas, Desa Wisata Kamasan, dan Desa Wisata Pakseballi.
 - g. Desa Adat di Klungkung: Desa Adat Kemoning, Desa Adat Sengkiding, dan Desa Adat Sangkanbuana.
 - h. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Kabupaten Klungkung, antara lain:
 - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),
 - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA)
 - Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI),
 - Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI),
 - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),
 - Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi).
2. Kunjungan ke Museum Kertha Gosa dan Museum Semarajaya.

II. DATA TEMUAN

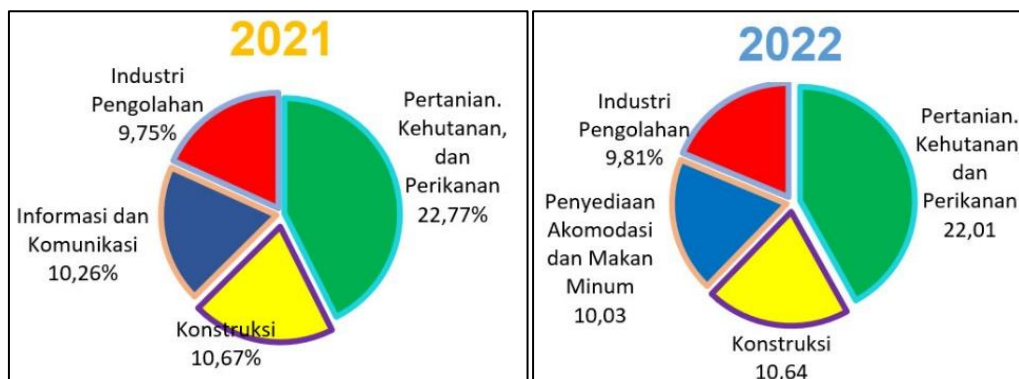
1. Luas Wilayah Kabupaten Klungkung (315 km²), terdiri 4 kecamatan, 53 desa, 6 kelurahan. Luas Kecamatan Klungkung 29,05 km², Banjarangkan 45,76 km², Dawan 37,38 km², Nusa Penida 202,84 km². Visi Kabupaten Klungkung yaitu pembangunan kepariwisataan daerah berkelas dunia berbasis budaya, masyarakat, kemitraan dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat unggul dan sejahtera. DPK (destinasi pariwisata kabupaten) yang dikembangkan adalah (1) Klungkung Daratan (wilayah Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, dan Dawan), dan (2) Klungkung

Kepulauan (wilayah Kecamatan Nusa Penida). DPK Klungkung daratan dikembangkan dengan tema wisata budaya dan kreatif (desa wisata) dan DPK Klungkung kepulauan dikembangkan dengan tema wisata budaya dan bahari.

2. Data kunjungan jumlah wisatawan di Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut.



3. Klungkung tercatat merupakan wilayah dengan kenaikan investasi (PMA dan PMDN) tertinggi selama 2021–2022. Nilai investasi meningkat 42,4% dari Rp190,25 milyar menjadi Rp270,9 milyar. Kenaikan investasi ini berdampak pada percepatan pertumbuhan pariwisata Klungkung. Sektor pariwisata meningkat hingga 16,75% di tahun 2022. Hal ini juga berdampak pada kembalinya pariwisata ke dalam 4 (empat) besar kontributor ekonomi Klungkung.



4. Pendapatan dari pajak pariwisata dan retribusi pariwisata Kabupaten Klungkung, adalah sebagai berikut.

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Retribusi Tempat Rekreasi	Total
2013	2.319.726.997	2.255.156.666	120.134.589	173.310.000	4.868.328.252
2014	3.525.640.960	3.207.460.323	180.531.528	2.109.891.000	9.023.523.811
2015	6.075.888.399	5.523.627.260	164.662.467	2.587.560.000	14.351.738.126
2016	6.675.105.660	7.596.205.725	133.946.892	2.687.578.000	7.092.836.278
2017	10.328.352.583	10.329.979.595	229.645.449	3.056.671.000	23.944.648.628
2018	14.669.946.480	11.969.388.589	155.698.524	3.658.471.000	30.453.504.594
2019	17.910.389.182	14.959.525.998	178.075.341	13.196.604.000	46.244.594.521
2020	4.017.460.593	3.392.964.867	52.413.607	2.928.340.000	10.391.179.067
2021	947.073.617	1.153.162.608	77.904.721	4.050.000	2.182.190.946
2022	12.883.103.137	11.946.650.525	240.832.580	8.192.585.000	33.263.171.242
2023	16.316.335.551	16.480.853.335	248.594.533	9.787.540.000	42.833.323.419

5. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut.

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2013	67.401.910.318,30
2014	98.837.765.832,75
2015	120.033.025.497,12
2016	134.772.304.215,54
2017	153.233.910.223,61
2018	186.974.283.820,89
2019	225.063.771.735,40
2020	220.891.875.118,99
2021	254.494.496.179,50
2022	309.462.881.500,11
2023	175.230.796.477,27

6. PDRB per kapita menurut harga berlaku Kabupaten Klungkung meningkat dari Rp40,60 juta di tahun 2021 menjadi Rp43,03 juta. Sementara dari sisi harga konstan 2010, PDRB Klungkung mengalami kenaikan 1,24% antara tahun 2021 ke 2022 dari Rp26,63 juta menjadi Rp26,96 juta.
7. Jumlah pengangguran Klungkung mengalami penurunan yang paling tinggi di Bali dengan turun 59,44% (5,57 ribu ke 2,23 ribu jiwa) antara 2021 dan 2022. Tidak hanya dari sisi jumlah, persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Klungkung juga mengalami penurunan paling tinggi yaitu 3,39 poin dari 5,35% ke 1,96%. Klungkung tercatat sebagai kabupaten dengan penurunan penduduk miskin ekstrim di tahun 2022. Penduduk miskin ekstrim turun 1,03 poin dari 1,51% ke 0,48%. Jumlah penduduk miskin ekstrim turun 68,13% dari 2,73 ribu ke 0,48 ribu jiwa antara 2021 ke 2022.
8. Berikut peta daerah tujuan wisata Nusa Penida di Kabupaten Klungkung. Nusa Penida adalah sebuah pulau (nusa) bagian dari negara Republik Indonesia yang terletak di sebelah tenggara Bali yang dipisahkan oleh selat Badung. Di dekat pulau ini terdapat juga pulau-pulau kecil lainnya yaitu Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan.



9. Proyeksi pendapatan dari pengembangan daerah tujuan Wisata Nusa Penida, Klungkung adalah sebagai berikut.

Destinasi	Investasi (Rp)	Estimasi Pendapatan (Rp/Tahun)
Atuh, Tanjung Juntill	37.717.000.000	4.500.000.000
Diamond Beach (1000 OH)	37.717.000.000	9.000.000.000
Kelingking Beach (5000 OH)	3.886.000.000	45.000.000.000
Broken Beach –Anggel Bilabong (5000 OH)	7.382.000.000	45.000.000.000
Cristal Bay	7.382.000.000	4.500.000.000
Tembeling Beach	23.050.400.000	4.500.000.000
Gamat Bay	7.495.000.000	4.500.000.000
Pandan Beach	4.945.000.000	4.500.000.000
Bukit Teletubbies	8.695.000.000	4.500.000.000
Kawasan Pura Puncak Sari	8.593.740.000	4.500.000.000
Devil's Tears	8.231.882.763	4.500.000.000
Total	155.095.022.763	135.000.000.000

10. Tantangan-tantangan pembangunan kepariwisataan Klungkung, secara umum adalah: (1) komitmen bersama Nusa Penida sebagai titik ungkit pembangunan kepariwisataan Kabupaten Klungkung; (2) percepatan kejelasan aset untuk pengembangan destinasi; (3) pengelolaan sampah, air bersih/minum, listrik; (4) penguatan struktur industri pariwisata (organisasi, standarisasi); (5) peningkatan peran kelembagaan pariwisata; (6) perilaku pelaku pariwisata dan, (7) partisipasi masyarakat, termasuk desa.

III. DISKUSI/PEMBAHASAN

Dalam diskusi pada pertemuan dengan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, terdapat beberapa masukan dan pendapat.

- a. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, menyampaikan antara lain, bahwa:
- Kabupaten Klungkung memperkenalkan program aksi Gema Santi (gerakan masyarakat santun dan inovatif) dan seluruh program yang dibuat bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat di Klungkung.

- Klungkung merupakan pusat kebudayaan di Bali. Klungkung pada masanya, terdapat kerajaan lungkung berdiri bersamaan dengan dibangunnya Puri Agung Klungkung, sehingga Klungkung dulunya disebut Kota Raja Diraja. Terkait kebudayaan, Bali juga tengah membangun pusat kebudayaan Bali, yang mengintegrasikan kebudayaan, pariwisata dan UMKM di Bali seluas 381 hektar.
 - Saat ini Klungkung tengah tumbuh, dimana iklim investasi tengah diberi ruang yang besar sehingga pariwisata tumbuh seiring investasi. (*lihat data temuan di angka II*). Pengangguran dan kemiskinan menurun tajam dan terdapat peningkatan PAD yang signifikan.
- b. Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati, menyampaikan pandangan bahwa terdapat 4 (empat) aspek dalam pembangunan pariwisata, yang saat ini menjadi fokus Klungkung, yaitu (1) destinasi, (2) industri, (3) pemasaran, dan (4) kelembagaan. Keempatnya harus berjalan secara harmonis.
- Masalah pengelolaan destinasi, antara lain adalah terkait dibutuhkannya perlindungan destinasi ruang publik. Misalnya pantai dan pegunungan, yang oleh masyarakat digunakan sebagai ruang privat. Perlu diatur Batasan penguasaan akses ke ruang publik, sebab ada kecenderungan investor untuk menprivatisasi ruang publik tersebut.
 - Masalah industri, perlu ada ketegasan pengaturan standarisasi industri. Terkait pemasaran, perlu standar pemasaran dalam dan luar negeri. Terkait kelembagaan, perlu peningkatan kerja sama dan koordinasi asosiasi yang mewadahi pariwisata.
- c. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, menyampaikan antara lain:
- Klungkung memiliki Museum Semarajaya. Museum-museum ini perlu peningkatan kelengkapan terhadap tiga ruang pameran yang ada.
 - Pada 1689, dalam sejarahnya, Klungkung membangun kerajaan. Peninggalan yang masih ada adalah Kertha Gosa dan Balai Kambang. Permasalahan yang ada adalah diperlukannya restorasi bangunan tua tersebut.
 - Beberapa kegiatan kebudayaan, banyak dilakukan, misalnya kegiatan lomba untuk anak-anak sekolah, dan sebagainya. Pendataan warisan budaya tak benda tengah gencar dilakukan. Saat ini ada delapan warisan budaya tak benda yang tengah dicatatkan di Kemkumham, lima diantaranya telah mendapat pengakuan.
 - Nusa Penida dengan berbagai kekayaan budayanya, tengah menggencarkan kegiatan even kebudayaan. Perlu pembinaan lebih lanjut dan perlu pengakuan dari pusat. Nusa Penida saat ini masih mengandalkan wisata alam, padahal wisata budaya sangat kaya.
- d. Kepala Desa Adat Sengkiding, mengatakan bahwa tidak semua wilayah di Bali mengusung ogoh-ogoh menyambut pergantian Tahun Baru Saka, Nyepi. Salah satunya, pemuda di Desa Adat Sengkiding, Kabupaten Klungkung, Bali. Mereka menggelar tradisi yang disebut Mebayang-Bayang. Tradisi Mebayang Bayang merupakan aksi tarik-tarikan belulang godel betina (anak sapi yang belum dicocok hidungnya), yang digelar secara

turun temurun sejak berdirinya Desa Adat Sengkiding tahun 1900-an. Desa Sengkiding merupakan desa yang tidak melaksanakan tradisi mengarak ogoh-ogoh saat menjelang Hari Nyepi. Namun melaksanakan acara ritual Mebayang Bayang ini. Bendesa Desa Adat Sengkiding mengatakan, tradisi Mebayang Bayang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, sehari jelang Hari Raya Nyepi. Tujuannya sebagai penolak hal-hal negatif dari luar dan dalam, sehingga desa tetap aman dan masyarakat ikut terhindar dari marabahaya, dan kesusahan. Kepala adat Sengkiding mengusulkan agar tercatat sebagai warisan budaya tak benda, yaitu tradisi Mebayang-Bayang, kepada pemerintah dan UNESCO.

- e. Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Klungkung, menyampaikan antara lain bahwa:
 - Klungkung terkenal dengan Kota Semarapura, lebih indah dari Ubud. Banyak Desa Wisata dan Desa Adat berkembang di Klungkung.
 - Terkait jumlah kunjungan, perlu dibandingkan dengan negara lain. Indonesia yang 17.00-an pulau tidak pernah mencapai 20 Juta kunjungan wisman. Malaysia sudah mengejar 30-an juta, Singapura 35-an juta, Thailand 45-an juta.
 - Kita memiliki mimpi untuk menjadikan Nusa Penida sebagai *world class tourism* dengan *quantity tourism*, tidak banyak kunjungannya tapi *spending money*-nya lebih banyak.
- f. Praktisi pariwisata dari BPPD Kabupaten Klungkung menambahkan antara lain terkait pemasaran pariwisata harus melibatkan asosiasi pariwisata, biaya promosi jika bisa dibiayai oleh pemerintah dan infrastruktur destinasi wisata harus selalu ditingkatkan.
- g. Anggota pengurus PHRI kabupaten Klungkung menyampaikan antara lain sebagai berikut:
 - *sustainable tourism* mengenal tiga aspek penting (1) ekonomi, (2) sosial, (3) lingkungan. Ketiganya harus berjalan harmonis dan seiring.
 - mengharapkan Nusa Penida menjadi destinasi favorit, sehingga perlu komitmen pemerintah agar menjadikannya sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.
- h. Kepala kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kabupaten Klungkung menyampaikan antara lain (1) meminta pemerintah menempatkan desa wisata ke tempat yang lebih tinggi dalam Undang-Undang tentang Pariwisata; (2) Desa wisata terkendala infrastruktur, mohon lebih diperhatikan pemerintah.
- i. Koordinator komunitas desa wisata Klungkung menyampaikan agar kita lebih menggali potensi gotong-royong, dan memperkuat desa wisata sebagai magnet baru di Bali.
- j. Menanggapi masukan dari pemangku kepentingan, Anggota Komisi X DPR RI melalui Prof. Djohar Arifin Husin, Ledia Hanifa A., Dewi Coryati, dan Anita Jacoba Gah, menyampaikan pandangannya antara lain:

- transportasi ke Klungkung, dari Denpasar, cukup ramai dan padat, memerlukan waktu lebih dari satu jam. Oleh karena itu Pemerintah perlu memerhatikan waktu perjalanan ke Klungkung ini dipersingkat dengan pembuatan infrastruktur jalan.
- area publik tidak boleh diprivatisasi oleh swasta. Pantai dan area publik lain harus ada perlindungan hukumnya sehingga tetap bisa dinikmati Masyarakat, termasuk akses ke destinasi wisata harus tetap menjadi milik publik.
- peran penting pemerintah daerah dalam membangun pariwisata, perlu dibuktikan melalui dukungan anggaran (APBD) meskipun pariwisata adalah merupakan “urusan pilihan” sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

IV. KESIMPULAN

1. Pasca Covid-19, kondisi kepariwisataan di Kabupaten Klungkung sudah mengalami aktivitas yang sangat baik, bahkan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berkat kenaikan investasi (PMA dan PMDN) tertinggi selama 2021—2022 dengan investasi meningkat 42,4% dari Rp190,25 milyar menjadi Rp270,9 milyar, berdampak pada percepatan pertumbuhan pariwisata Klungkung. Pertumbuhan wisata ini juga mendorong PAD sehingga mengurangi pengangguran yang paling tinggi di Bali dengan turun 59,44% (5,57 ribu ke 2,23 ribu jiwa) antara 2021 dan 2022, dan menurunkan kemiskinan 1,03 poin dari 1,51% ke 0,48%. Jumlah penduduk miskin ekstrim turun 68,13% dari 2,73 ribu ke 0,48 ribu jiwa antara 2021 ke 2022.
2. Permasalahan kepariwisataan yang menonjol adalah ada pada beberapa DTW yang kepemilikan lahannya maupun akses menuju ke DTW milik swasta, sehingga pengelolaan aksesibilitasnya mengalami hambatan karena harus dilakukan kerja sama dengan pihak pemilik. Kedepan, harus ada sinkronisasi pengaturan aksesibilitas menuju destinasi publik antara peraturan tentang kepariwisataan dengan peraturan penataan ruang secara umum, yang didalamnya mengatur terkait batas dan kewajiban penguasaan swasta terhadap lahan-lahan yang menjadi prioritas kawasan publik. Sehingga pembagunan pariwisata berkelanjutan dapat mendukung rencana induk kepariwisataan nasional, provinsi maupun daerah untuk kepentingan bersama.
3. Destinasi pariwisata di Klungkung, telah diupayakan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan pelestarian budaya serta cagar budaya. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan:
 - a. Pelestarian Budaya.
Klungkung memiliki banyak cagar budaya bersejarah, yang upaya pelestarian dan pemeliharannya menjadi prioritas dalam

- pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah bekerjasama dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa situs-situs ini tetap terjaga.
- b. Pengembangan Wisata Berbasis Budaya.
Klungkung juga berusaha mengembangkan pariwisata berbasis budaya Bali, mencakup pertunjukkan tari tradisional, seni dan kerajinan lokal, serta kuliner tradisional. Upaya ini membantu mempertahankan identitas budaya sambil memberikan pengalaman berharga bagi wisatawan.
 - c. Pengaturan dan Pengawasan Wisatawan.
Pemerintah setempat mengatur dan mengawasi arus wisatawan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap cagar budaya dan lingkungan, melalui registrasi wisatawan pada destinasi, melibatkan pembatasan jumlah wisatawan di situs-situs bersejarah tertentu atau mengatur waktu kunjungan.
4. Pemerintah Kabupaten Klungkung saat ini berkonsentrasi kepada masalah (1) destinasi, (2) industri, (3) pemasaran, dan (4) kelembagaan. Masalah pengelolaan destinasi, antara lain adalah terkait dibutuhkannya perlindungan destinasi ruang publik. Masalah industri, perlu ada ketegasan pengaturan standarisasi industri. Terkait kelembagaan, perlu peningkatan kerja sama dan koordinasi asosiasi yang mewadahi pariwisata. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga fokus pada upaya pengembangan *quality tourism*.
 5. Pemerintah Kabupaten Klungkung meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat agar mendukung upaya Kabupaten Klungkung untuk menjadikan Nusa Penida sebagai *world class destination*, diantaranya melalui peningkatan infrastruktur pariwisata dan even kebudayaan yang masih minim.
 6. Kepala Desa Adat Sengkiding, meminta dukungan kepada Pemerintah untuk menjadikan tradisi Mebayang-Bayang, yaitu aksi tarik-tarikan belulang godel betina (anak sapi yang belum dicocok hidungnya), yang digelar secara turun temurun sejak berdirinya Desa Adat Sengkiding tahun 1900-an, sebagai warisan budaya tak benda kepada pemerintah maupun UNESCO.

V. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung atas upaya untuk menjadikan Nusa Penida sebagai *world class destination*, diantaranya melalui peningkatan infrastruktur pariwisata dan even kebudayaan.
2. Komisi X DPR RI mendesak kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengawal keberhasilan Desa Adat Sengkiding dalam upaya menjadikan tradisi Mebayang Bayang sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO.

VI. PENUTUP

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Klungkung Bali pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 sebagai bahan masukan dan perhatian dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 29 September 2023

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A 444**